

KONTRIBUSI BUDAYA ORGANISASI, KOMPETENSI DAN  
KESIAPAN GURU TERHADAP IMPLEMENTASI  
PEMBELAJARAN KURIKULUM BERBASIS  
KOMPETENSI (KBK) SMA NEGERI  
DI KOTA SURAKARTA

TESIS



Disusun Oleh :

TRI WAHYANA

NIM : Q. 100 040 094

Program Studi : Magister Pendidikan

Konsentrasi : Manajemen Sistem Pendidikan

PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2006

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang selanjutnya disebut Kurikulum 2004 mulai diberlakukan secara berangsur-angsur tahun ajaran 2004 – 2005; pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah. Hal ini berarti, pada awal tahun ajaran 2004, Taman Kanak-Kanak (TK/TKA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Iftidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), sebagian besar sudah mengikuti perubahan kurikulum. Sementara bagi sekolah yang belum siap, bisa tetap melaksanakan kurikulum 1994 sambil mempersiapkan pelaksanaan kurikulum baru. Waktu yang diberikan bagi sekolah yang belum siap ini sekitar tiga tahun ajaran. Dengan demikian, tahun ajaran 2007 – 2008 semua sekolah pada berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta diharapkan telah melaksanakan Kurikulum 2004 secara utuh dan menyeluruh (Mulyasa, 2004: 1).

Perubahan kurikulum ini harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan proses dan hasil pendidikan. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan, baik kepala sekolah, guru maupun peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena dampaknya secara langsung dari setiap perubahan kurikulum. Di samping

itu, orang tua, para pemakai lulusan, dan para birokrat, baik di pusat maupun di daerah akan terkena dampak dari perubahan kurikulum tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal penting yang perlu ditekankan disini, jangan sampai perubahan kurikulum, atau Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi ini memiliki nasib yang sama dengan link and match, yang tidak jelas link-nya, sehingga ditinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, perubahan kurikulum ini harus disikapi secara positif dengan mengkaji dan memahami implementasinya di sekolah.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional juga mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 3 Mei 2002. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami perubahan secara merata (Depdiknas, 2001: 1-2).

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Faktor kedua,

penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik.

Faktor ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim (Mulyasa, 2004:5).

Data Depdiknas menunjukkan, guru yang layak mengajar hanya 50,7 % untuk jenjang SD; 64,1 % untuk jenjang SMP; dan 67,1 % untuk jenjang SMA (PDIP-Balitbang, 2004). Selain itu, rata-rata kompetensi guru tidak mencapai 50 % seperti ditunjukkan dalam tes umum guru TK-SD, dan tes bidang studi guru SMP/SMA/SMK (Statistik Deskriptif Skor Mentah Per Mata Uji, Direktorat Tenaga Kependidikan, 2004).

Mengingat besarnya biaya dan lama waktu untuk meningkatkan kelayakan mengajar para guru, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan menawarkan solusi program penyetaraan guru (menyetarakan lima tahun mengajar dengan satu jenjang kualifikasi akademik). Contoh, lulusan D-3 dengan lima tahun pengalaman mengajar dianggap setara lulusan D-4. Lokakarya Implementasi Undang-undang Guru dan Dosen atas kerja sama Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Depdiknas -PBNU menawarkan model sertifikasi 300.000 guru di lingkungan Maarif melalui on the job training. Dengan asumsi Rp 1 juta per guru, dibutuhkan Rp 60 miliar untuk 600.000 guru per tahun (Kompas, Jum'at, 3 Februari 2006).

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi (competency based curriculum), yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan reformasi, guna menjawab

tantangan arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur, dan adaptif terhadap berbagai perubahan.

Kurikulum berbasis kompetensi diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara efektif, efisien, dan berhasil guna. Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek mesonya berkaitan dengan kebijakan daerah tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu sekolah.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan kurikulum yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tampil

sebagai alternatif kurikulum yang ditawarkan. Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, dan efisiensi pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, industri, dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik.

Implementasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menuntut kerjasama yang optimal di antara para pengajar. Dengan kata lain Kurikulum Berbasis Kompetensi memerlukan pengajaran berbentuk team, dan menuntut kerjasama yang kompak di antara para anggota team. Kerjasama antara para guru sangat penting dalam proses pendidikan yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Sehubungan dengan itu, ahli pendidikan, para pendidik, dan para pengamat pendidikan akhir-akhir ini sedang mempertimbangkan konsep kurikulum berbasis kompetensi, untuk diterapkan secara luas (broad), tidak saja dalam pendidikan kejuruan tetapi mencakup seluruh jenjang dan jenis pendidikan. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memiliki konsep pendekatan pembelajaran yang berbeda dengan kurikulum 1994, yaitu berbasis kompetensi dimana fokus program sekolah adalah pada siswa serta apa yang akan dikerjakan oleh mereka dengan memperhatikan kecakapan hidup (life skill) dan pembelajaran kontekstual. Dalam pengembangannya, seluruh elemen sekolah dan masyarakat perlu terlibat secara langsung, antara lain kepala sekolah, komite sekolah, guru, karyawan, orang tua siswa serta siswa. Sebuah kurikulum tidak hanya sekedar instruksi pembelajaran yang disusun oleh pemerintah untuk diterapkan di sekolah

masing-masing. Sinclair (2003: 27) menegaskan bahwa kurikulum yang baik adalah yang memberi keleluasaan bagi sekolah untuk mengakomodasikan kebutuhan - kebutuhan khusus peserta didik sesuai tuntutan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, sekolah memiliki wewenang penuh dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam proses belajar mengajar. Salah satu unsur terpenting dalam penerapan KBK sangat tergantung pada pemahaman guru untuk menerapkan strategi pembelajaran kontekstual di dalam kelas. Akan tetapi, fenomena yang ada di lapangan menunjukkan sedikitnya pemahaman guru mengenai strategi ini. Oleh karena itu diperlukan suatu model pengajaran dengan menggunakan pembelajaran kontekstual yang mudah dipahami dan diterapkan di kelas secara sederhana.

Pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil penelitian Dewey (dalam Johnson, 2002: 172) yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan yang atau peristiwa yang akan terjadi disekelilingnya. Pembelajaran ini menekankan pada daya pikir yang tinggi, transfer ilmu pengetahuan, mengumpulkan dan menganalisis data, memecahkan masalah-masalah tertentu baik secara individu maupun kelompok. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran kontekstual dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa, lebih mengaktifkan siswa dan guru, mendorong berkembangnya kemampuan baru, menimbulkan jalinan

kegiatan belajar di sekolah, rumah dan lingkungan masyarakat. Melalui pembelajaran ini, siswa menjadi lebih responsif dalam menggunakan pengetahuan dan ketrampilan di kehidupan nyata sehingga memiliki motivasi tinggi untuk belajar.

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menuntut guru harus lebih sabar, penuh perhatian dan pengertian, mempunyai daya kreatifitas yang tinggi dan dedikasi penuh. Perhatian dan pengertian dari guru kepada peserta didik akan menumbukan rasa percaya diri peserta didik kepada gurunya. Dengan demikian timbulah persahabatan yang unik antara guru dengan peserta didik. Guru menjadi sahabat tempat bertanya, teman diskusi dan mencurahkan seluruh gagasan dan pengetahuan serta kompetensi peserta didik tanpa rasa takut atau canggung. Hubungan persahabatan yang berlangsung tetap dalam ikatan yang etis dan dinamis. Interaksi seperti di atas dapat terwujud bila terjadi saling silang, pemberian perhatian antara peserta didik dan guru. Hal itu dapat tercapai bila guru mampu berkomunikasi dengan seimbang dan multi arah, dengan menggunakan bahasa yang akrab, bersahabat ramah serta luwes dan lugas.

Guru harus mampu mengembangkan kemampuan kompetensi dirinya sendiri sebelum mampu membelajarkan peserta didik mencari, menggali dan menemukan kompetensinya. Diperlukan kemauan, kemampuan dan kesungguhan yang kuat dari guru. Uraian di atas seolah mengasosiasikan ke dalam dunia pendidikan pewayangan di mana guru dianggap sebagai seorang bhagawan (Tilaar, 1997: 92). Karena secara tidak langsung dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diperlukan bukan saja seorang guru tetapi seorang bhagawan.

Pendidik yang mulia berhati suci dan rela mengorbankan kehidupannya hanya untuk kebaikan dan pendidikan semata-mata. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kenyataan-kenyataan pahit di mana profesi guru masih belum dapat menjamin kesejahteraan. Hal ini dikemukakan oleh Akadum (1999: 1) yang menyatakan bahwa guru masih terselingkung dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak terutama pengambil kebijakan; (1) profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendah gajinya. Rendahnya gaji berimplikasi pada kinerjanya; (2) profesionalisme guru masih rendah.

Selain faktor di atas faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh antara lain; (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada; (2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju; (3) kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa mempehitungkan outputnya kelak di lapangan sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan; (4) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi (Akadum, 1999: 2).

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah kurikulum ideal yang

tidak saja akan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, tetapi juga menuntut para guru untuk mempersiapkan seluruh potensinya. Kesehatandan tercapainya kesejahteraan dalam arti sesungguhnya untuk para guru harus diperhatikan dengan nyata, bukan hanya retorika. Bagaimana guru dapat mengajar dengan baik di dalam kelas, sementara tubuhnya lemah karena makanan yang seadanya. Untuk mencapai tujuan dilaksanakannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tidak saja menuntut para guru tetapi juga diperlukan keseriusan pemerintah untuk memberikan pendapatan dan kesejahteraan yang memadai untuk para guru.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan mengambil judul “Kontribusi Budaya Organisasi, Kompetensi, dan Kesiapan Guru Terhadap Implementasi Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Negeri di Kota Surakarta”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu antara lain:

1. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menuntut kompetensi guru yang tinggi, karena dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), peranan guru cenderung menjadi fasilitator.
2. Kesiapan guru menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengimplementasian Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hal ini

disebabkan karena paradigma pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bergeser dari behaviorisme menjadi konstruktivisme. 3. Adanya kenyataan -kenyataan pahit bahwa profesi guru masih belum dapat menjamin kesejahteraan, sehingga guru belum dapat mengembangkan profesinya sebagaimana diharapkan yang mengakibatkan kompetensi guru masih cukup rendah .

4. Budaya organisasi dalam sistem pendidikan nasional masih dilakukan secara birokratik-sentralistik dan peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.

5. Salah satu unsur terpenting dalam penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sangat tergantung pada pemahaman guru untuk menerapkan strategi pembelajaran kontekstual di dalam kelas. Akan tetapi, fenomena yang ada di lapangan menunjukkan sedikitnya pemahaman guru mengenai strategi ini.

#### C. Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksitas permasalahan yang mempengaruhi implementasi pembelajaran berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, hanya dibatasi pada faktor-faktor yang diduga mempunyai kontribusi terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SMA Negeri Kota Surakarta antara lain: budaya organisasi, kompetensi, dan kesiapan guru.

#### D. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Adakah kontribusi yang signifikan budaya organisasi, yang terdiri dari aspek - aspek karakteristik anggota, etika, sistem hak dan kewajiban anggota, dan struktur organisasi terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Negeri di Kota Surakarta?
2. Adakah kontribusi yang signifikan kompetensi guru, yang terdiri dari aspek - aspek kemampuan mendukung siswa dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, memahami materi ajar, merencanakan pengajaran, mengevaluasi pembelajaran siswa, dan pengembangan profesi terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Negeri di Kota Surakarta?
3. Adakah kontribusi yang signifikan kesiapan guru yang meliputi aspek -aspek kesiapan dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Negeri di Kota Surakarta?
4. Adakah kontribusi budaya organisasi, kompetensi, dan kesiapan guru secara bersama-sama terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Negeri di Kota Surakarta?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui kontribusi budaya organisasi, yang terdiri dari aspek -aspek karakteristik anggota, etika, sistem hak dan kewajiban anggota, dan struktur

organisasi terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Negeri di Kota Surakarta.

2. Mengetahui kontribusi kompetensi guru, yang terdiri dari aspek -aspek kemampuan mendukung siswa dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, memahami materi ajar, merencanakan pengajaran, mengevaluasi pembelajaran siswa, dan pengembangan profesi terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Negeri di Kota Surakarta.

3. Untuk mengetahui kontribusi kesiapan guru yang meliputi aspek -aspek kesiapan dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Negeri di Kota Surakarta.

4. Mengetahui kontribusi budaya organisasi, kompetensi, dan kesiapan guru secara bersama-sama terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Negeri di Kota Surakarta.

#### F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun yang bersifat teoritis. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Praktis

a. Sebagai sumbangan informasi bagi sekolah Kota Surakarta tentang kontribusi budaya organisasi, kompetensi, dan kesiapan guru terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Negeri di Kota

Surakarta pada khususnya dan instansi pendidikan pada umumnya.

b. Dengan mengetahui tentang kontribusi budaya organisasi, kompetensi, dan kesiapan guru terhadap implementasi pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), diharapkan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) akan lebih mempertimbangkan aspek-aspek budaya organisasi, kompetensi, dan kesiapan guru.

## 2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Memberikan sumbangan wawasan bagi penelitian tentang Sumber Daya Manusia pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam penyediaan data dasar, yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya memperkuat teori-teori tentang budaya organisasi, kompetensi, dan kesiapan guru.
- c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dan mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian survai mengenai manajemen sistem pendidikan dan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh derajat Magister di Fakultas Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.